**Arab Saudi (sunni) dan Iran (syi’ah) kontemporer: konflik atau persaingan?**

**Muhammad Yudhi Firmansyah1\***

1. *Program Doktor Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, 15412, Indonesia*

\*Korespondensi: muhammad.yudhifirmansyah22@mhs.uinjkt.ac.id

Diterima: 2 April, 2024 Direvisi Akhir: Disetujui: 2 Mei, 2024

**ABSTRAK**

**Latar** **Belakang**: Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki persaingan antara Arab Saudi (Sunni) dan Iran (Syiah) dalam membangun kekuatan di Timur Tengah dengan menggunakan pendekatan agama dan ideologi. Fokusnya adalah untuk mencapai keseimbangan kekuatan antara Arab Saudi dan Iran di kawasan Timur Tengah, terutama terkait konflik di Suriah dan Yaman. **Metode**: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan berita, artikel jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi pemerintah, dan pidato politik. Metode pengumpulan data melibatkan analisis konten dari sumber-sumber yang relevan dan survei literatur. Observasi terhadap perkembangan politik terbaru di Timur Tengah juga dilakukan. **Hasil**: Artikel ini menyoroti peran signifikan Arab Saudi dan Iran dalam konflik di Suriah dan Yaman, termasuk dalam hal pendanaan dan bantuan logistik militer. Tidak diragukan lagi, perkembangan politik di Timur Tengah selalu menjadi sorotan global. Kekacauan tingkat tinggi yang kompleks, bersama dengan isu-isu regional dan global, menyebabkan konflik yang sedang berlangsung, menarik perhatian masyarakat umum. Arab Saudi dan negara-negara lain terus mendapatkan perhatian global karena pengaruh mereka dalam dinamika ini. **Kesimpulan**: Baik Arab Saudi maupun Iran secara aktif mencari mitra dalam upaya menjaga keseimbangan dengan negara-negara lain yang dianggap memiliki keunggulan relatif.

**KATA KUNCI:** konflik; kompetisi; sunny; syi’ah.

***ABSTRACT***

***Background****: This article aims to investigate the competition between Saudi Arabia (Sunni) and Iran (Shia) in building power in the Middle East using a religious and ideological approach. The focus is on achieving a balance of power between Saudi Arabia and Iran in the Middle East region, especially regarding the conflicts in Syria and Yemen.* ***Methods****: This research uses a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected from various sources, including news reports, scholarly journal articles, books, official government documents and political speeches. The data collection method involved content analysis of relevant sources and a literature survey. Observation of recent political developments in the Middle East was also conducted.* ***Results****: This article highlights the significant roles of Saudi Arabia and Iran in the conflicts in Syria and Yemen, including in terms of funding and military logistical assistance. Undoubtedly, political developments in the Middle East are always in the global spotlight. Complex high-level chaos, along with regional and global issues, cause ongoing conflicts, drawing the attention of the general public. Saudi Arabia and other countries continue to gain global attention due to their influence in this dynamic.* ***Conclusion****: Both Saudi Arabia and Iran are actively seeking partners in an effort to maintain parity with other countries perceived to have relative advantages.*

***KEYWORDS:*** *conflict; competition; sunni; syi’ah.*

**1. Pendahuluan**

Persaingan atau perpecahan antara Sunni dan Syiah dimulai pada abad ke-14 saat terjadi perdebatan sengit tentang siapa yang seharusnya memimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perselisihan ini akhirnya menyebabkan perpecahan umat Muslim menjadi dua kelompok: Sunni dan Syiah. Pengaruh Islam Sunni sangat kuat selama Kekhalifahan Turki Usmani menguasai wilayah Timur Tengah, diikuti oleh penyebaran gerakan Wahabi di Semenanjung Arab yang memiliki ideologi serupa dengan Sunni. Akibatnya, kaum Sunni menjadi mayoritas di Timur Tengah. Saat ini, Sunni, yang diwakili oleh Arab Saudi di Timur Tengah, memiliki peran yang sangat penting di seluruh wilayah tersebut.

Sementara itu, kelompok Syiah di Iran mulai menunjukkan kekuatan politik mereka pada tahun 1979 di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Gerakan ini berhasil menggulingkan pemerintahan Shah Reza Pahlevi, mengawali sistem kepemimpinan teokratis yang baru di Iran. Iran kemudian menyebarkan gagasan revolusi di Timur Tengah untuk mendorong perubahan kepemimpinan. Berdasarkan pemahaman Syiah Imamiyah yang tidak dibatasi oleh wilayah geografis, gerakan ini membawa pesan universal. Karena peran besar Arab Saudi di Timur Tengah dan pengaruh Iran yang lebih terbatas di negara-negara Teluk seperti Suriah, Lebanon, dan Yaman, pemerintah Teheran dapat memperluas pengaruhnya di seluruh Timur Tengah dan wilayah Teluk.

Arab Saudi yang Sunni dan Iran yang Syiah menggunakan pendekatan ideologis untuk mencapai keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan memperluas pengaruh mereka. Dalam konflik ini, pihak Sunni menganggap ideologi Syiah sebagai ancaman serius. Oleh karena itu, negara-negara Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi merasa perlu untuk mencegah masuknya ideologi tersebut yang dapat merusak struktur sosial dan politik yang ada. Sebaliknya, ideologi Syiah yang berasal dari Iran berusaha dengan berbagai cara untuk memasuki dan menyebarkan keyakinan mereka di wilayah tersebut.

**2. Metode**

Penelitian ini akan menerapkan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan ini akan memfasilitasi pemahaman yang mendalam terhadap dinamika persaingan antara Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah, terutama dalam konteks agama dan ideologi. Data akan dikumpulkan dari beragam sumber, termasuk laporan berita, artikel jurnal, buku, dokumen resmi pemerintah, dan pidato politik. Pengumpulan data akan melibatkan analisis konten dari sumber-sumber yang relevan serta survei literatur. Selain itu, data akan diperoleh melalui observasi terhadap perkembangan politik terkini di Timur Tengah. Studi ini akan mengekstraksi temuan utama dan mengevaluasi implikasinya terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan regional. Implikasi praktis dari penelitian ini akan didiskusikan untuk membantu pemangku kepentingan dalam merancang strategi yang efektif dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah.

**3. Hasil dan Pembahasan**

*3.1 Definisi sunni-syiah*

Kosakata syi’ah ( شيؼة ) atau tasyayyu (تشيع ) dalam sudut pandang etimologis diartikan sebagai sebuah komunitas atau kelompok yang menjadi satu untuk sebuah tujuan ataupun permasalahan dengan pandangan yang sama. Atau dapat diartikan juga sebagai pembela/ pengikut seseorang, jamak syi’a (شيغ) asy-yaa’ (اشياع) dan kata syi’ah dapat berfungsi dalam tunggal dan jamak, laki-laki dan perempuan (Ali Audah, 1999).

Al-Fairuzzabadi menjelaskan bahwa "syi’atur rajul" secara umum merujuk pada siapa pun yang setia kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, sehingga menjadi julukan khusus bagi mereka. Dia juga menambahkan bahwa istilah ini berarti mengikuti dan mendukung seseorang dalam situasi tertentu. Menurut ulama Syiah Muhammad Jawad Maghniyah, yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, kelompok Syiah adalah mereka yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW secara tegas menetapkan Imam Ali sebagai khalifah penerusnya. Definisi ini sejalan dengan yang diberikan oleh Ali Muhammad al-Jurjani, seorang ulama Sunni beraliran Asy'ariyah (Shihab, 2007).

Terdapat berbagai pendapat mengenai asal mula Syiah. Salah satu pandangan yang dikemukakan oleh Harun Nasution (Nasution, 1985) menyatakan bahwa Syiah muncul pada saat Tahkim setelah Perang Shiffin. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Hamzah Abu Hatim dan Ihsan Ilahi Zhahir (Zhahir, 1984) Konflik ini dipicu oleh pertentangan politik antara Ali bin Abi Thalib, yang terpilih sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan, dan Muawiyah.

Namun, sebenarnya tanda-tanda awal kemunculan Syiah sudah terlihat pada akhir masa kepemimpinan khalifah Utsman bin Affan. Beberapa sahabat dan tabi'in (generasi Muslim saat itu) telah menunjukkan dukungan kepada Ali, di antaranya: Abu Dzar al-Ghiffari, Ammar ibn Yasir, Miqdad ibn Aswad, Ubay ibn Ka’ab, Salman al-Farisi, Jabir ibn Abdullah, Abu Ayyub al-Anshari, Hudzaifah, Buraidah, Utsman ibn Hanif, Sahl ibn Hanif, Abbas ibn Abdu al-Muttalib, dan seluruh Bani Hasyim.

Pada awalnya, Syiah hanya terdiri dari para sahabat dan umat Islam saat itu yang bersimpati dan mendukung Ali. Namun, dalam perkembangannya, Syiah saat ini meyakini bahwa Rasulullah SAW telah menegaskan secara eksplisit maupun implisit tentang kepemimpinan umat Muslim, yaitu bahwa Ali bin Abi Thalib akan menjadi penggantinya setelah beliau wafat. Keyakinan ini menjadi sangat terkenal di kalangan Syiah saat ini, meskipun jika ditelusuri lebih mendalam, kepercayaan ini baru muncul pada masa Imam Syiah keenam, Ja’afar al-Shadiq.

Merujuk pada awal kemunculan Syiah, yang kemudian melahirkan perpecahan ataupun pertentangan di kalangan ummat Islam, sesungguhnya timbulnya perpecahan dikalangan umat Islam pada awalnya bukan disebabkan perbedaan keyakinan dan pemikiran mengenai syariat maupun ajaran Islam yang lainnya, namun lebih disebabkan karena persoalan politik. Dalam perkembangan selanjutnya, karena kehidupan social politik ummat Islam tidak bisa lepas dari kehidupan keagamaan/praktek ajaran agama maka Syiah yang pada awalnya merupakan aliran politik dalam Islam juga terseret dalam perbedaan penafsiran keagamaa. Hal inilah yang membuat Syiah tidak dapat bertahan terlepas dari hubungannya dengan ajaran Islam dalam hal aqidah, keimanan, dan fiqih. Mereka menjadikan agama sebagai penopangnya untuk menguatkan keyakinan politik mereka. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan Syiah, tetapi juga di aliran lain. Perselisihan politik—pertentangan Ali dan Muawiyah—menghasilkan interpretasi dan pemahaman yang berbeda tentang ajaran Islam, yang pada akhirnya melahirkan Syiah.

Sementara Sunni sering dikaitkan dengan sunnah, yang berarti tradisi, orang atau kelompok yang mengikuti sunnah disebut ahlu sunnah. adalah individu atau kelompok yang secara teratur mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad SAW, termasuk kebiasaan beliau dalam perkataan dan tindakan beliau, serta kebiasaan sahabat mulia beliau(Shihab, 2007).

Istilah "Ahlu Sunnah," atau "Ahlu Sunnah wal Jama'ah," telah berkembang menjadi istilah yang merujuk pada kelompok atau komunitas yang mengikuti sunnah dan konsisten dalam mengamalkannya. Kelompok ini telah menjadi mayoritas dalam masyarakat Islam dan dianggap sebagai arus utama dalam pemahaman dan praktik ajaran Islam. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan mereka yang menganut salah satu dari empat mazhab fiqh terkenal: Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah (Hanafi), Imam Maliki, atau Imam Ahmad ibn Hanbal (Hambali) (Faza, 2015).

Awalnya, Ahlu Sunnah wal Jama'ah adalah nama bagi aliran Asy’ariyah dan Maturidiah, yang muncul sebagai reaksi terhadap paham Mu’tazilah yang pertama kali disebarkan oleh Wasil bin Atha' pada tahun 100 H/718 M. Pengaruh Asy’ariyah dan Maturidiah meningkat selama pemerintahan khalifah Abbasiyah, yaitu al-Ma’mun (813–833 M), al-Mu’tasim (833–842 M), dan al-Wasiq (842–847 M).

Dengan berkembangnya pemikiran Islam dan meluasnya wilayah kekuasaan Muslim, beragam pemikiran dari berbagai belahan dunia menyebar di kalangan umat Islam. Salah satu pendiri mazhab teologi Asy'ariyah, Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ary, lahir pada masa ini. Al-Asy'ary dan pengikutnya, bersama dengan al-Maturidy dan pengikutnya, dianggap sebagai pendiri mazhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Akibatnya, istilah "Ahlu Sunnah" digunakan untuk merujuk pada kelompok yang dikenal sebagai Sunni atau Sunniyin, yang mengikuti sunnah dan ijma. Menurut Cyril Glasse, mereka disebut Ahlu Sunnah wa al-Ijma karena mereka menganut sunnah dan konsensus (ijma) (Syak’ah, 1996).

*3.2 Sunni-syiah dalam dimensi politik*

Sebagian besar kelompok Sunni percaya bahwa pemerintahan diperlukan untuk memungkinkan orang bekerja sama dalam mencapai tujuan hidup mereka yang sebenarnya, dan mereka akan mendapat tempat yang baik di akhirat jika hidup sesuai dengan syariah. Namun, dalam pandangan Sunni, seorang khalifah atau pengganti Nabi Muhammad SAW haruslah seorang pria dan berasal dari suku Quraisy (Sahide, 2013).

Bagi Syiah, peristiwa Ghadir Khum, di mana Nabi Muhammad memilih Ali sebagai pemimpin umat dan menjadikannya wali, adalah bukti utama bahwa Ali adalah penerus yang sah. Menurut kepercayaan Syiah, ketika kembali dari haji terakhirnya, Nabi di Ghadir Khum, di hadapan banyak orang, menetapkan Ali sebagai penggantinya. Orang-orang Syiah hingga kini merayakan peristiwa ini sebagai festival keagamaan besar yang menandai pengumuman Ali sebagai khalifah yang sah (Thabathathaba’i, 1989).

Bagi Syiah, yang paling penting bukanlah hukum dan mistisisme, tetapi kesetiaan kepada Ali dan keyakinan bahwa hak khilafah hanya berada di tangan keluarga Ali. Hal ini memicu gerakan politik pada abad ke-7 dan ke-8 yang menentang Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Keluarga yang setia ini berkali-kali berusaha merebut khilafah. Namun, banyak tokoh Syiah kemudian beralih dari aktivitas politik ke refleksi keagamaan akibat kegagalan mereka dalam merebut kekuasaan politik (Lapidus, 2000). Secara politis, Syiah lebih menekankan pentingnya keturunan Rasulullah, yang dianggap memiliki legitimasi ilahi dan keilmuan tinggi, untuk memegang jabatan kepemimpinan umat Muslim. Mereka juga percaya bahwa kepemimpinan adalah warisan turun-temurun dari Nabi dan tidak bergantung pada penetapan atau penunjukan (Abidin, 2012).

Keyakinan Syiah mengalami perubahan signifikan setelah imam terakhir mereka menghilang pada tahun 873 M dan komunikasi langsung dengan imam tersembunyi berhenti pada tahun 941 M. Hal ini mengubah sifat keagamaan dan sosial Syiah. Mereka mulai mengutuk Muawiyah sebagai musuh Ali, menjadikan hari kematian Husayn di Karbala (Asyura) sebagai hari berkabung, dan memperingati peristiwa Ghadir Khum (Lapidus, 2000).

*3.3 Akar konflik sunni-syiah*

Sikap saling bermusuhan dan saling mengkafirkan menjadi sumber utama konflik antara Sunni dan Syiah. Karena mereka tidak mengakui konsep imamah yang dianut oleh Syiah dan membenci Ahlul Bait, kelompok Sunni menganggap Syiah sebagai musuh sebenarnya. Di sisi lain, Syiah menganggap Sunni sebagai sesat karena mengkafirkan tokoh-tokoh seperti Aisyah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan.

Menurut Joel L. Kraemer, akar konflik antara Sunni dan Syiah terletak pada penolakan Syiah Imamiyah terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang diakui oleh Sunni, serta penolakan mereka terhadap legitimasi tiga khalifah pertama sebelum Ali (Kraemer, 2003).

Al-Musawi menjelaskan bahwa ketegangan yang dirasakan oleh kaum Syiah membuat sulit bagi mereka untuk berbaur dan bersatu dengan saudara Sunni mereka. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan sebagian orang Sunni yang mengkafirkan, menghina, dan menyebarkan kebohongan tentang kaum Syiah, sementara kaum Syiah membenci dan mencerca para sahabat serta salaf (tokoh Muslim terdahulu) (Al-Musawi, 1988).

*3.4 Isu sunni-syiah dalam persaingan Arab Saudi-Iran*

Arab Saudi dianggap sebagai representasi Islam sunni dari seluruh dunia Arab. Iran dianggap sebagai antitesa Arab Saudi karena Iran mewakili bangsa non-Arab, terutama di Asia Barat, dan menganut keagamaan yang berbeda dengan Arab Saudi, yang dikenal sebagai mahzab.

Dilihat dari perspektif sejarah, perbedaan ideologi antara Sunni dan Syiah terutama berkaitan dengan pandangan dan keyakinan dasar tentang siapa yang seharusnya menjadi penerus kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad (Afala et al., 2009). Namun, ketika perbedaan ini pertama kali muncul, ia terus berkembang dan merambah ke berbagai bidang kepentingan politik. Hingga saat ini, perbedaan tersebut masih menjadi faktor utama dalam perbedaan antara dua kelompok Islam terbesar ini, terutama dalam konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran.

Baik Arab Saudi maupun Iran memiliki sistem politik yang berakar pada ajaran Islam, di mana Islam menjadi inti dari kebiasaan sehari-hari dan sistem politik negara tersebut. Menurut Masykuri Abdillah, hubungan antara agama dan negara selalu berubah dan tidak akan tetap sama karena terkait dengan paradigma atau cara berpikir individu atau masyarakat. Tiga paradigma utama dapat digunakan untuk membahas hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional: terintegrasi (menunjukkan penyatuan antara agama dan negara), interkoneksial (menunjukkan persinggungan antara agama dan negara), dan sekularistik (menunjukkan pemisahan antara agama dan negara) (Abdillah, 2013). Meskipun Arab Saudi telah melonggarkan penerapan hukum Islam akhir-akhir ini, pada dasarnya kedua negara tersebut menganut sistem yang mengintegrasikan agama dan negara.

Sementara Iran, yang dikontrol oleh Ayatullah Khomeini, menggunakan sistem republik Islam dengan ciri-ciri teokrasinya, Arab Saudi mengadopsi sistem monarki di mana keluarga Ibnu Saud memegang seluruh kekuasaan (Abdillah, 2013). Sistem pemerintahan Republik lebih mirip dengan sistem khulafaur rasyidin, meskipun Islam tidak menetapkan secara eksplisit bagaimana umat Islam harus membangun pemerintahan. Menurut Masykuri Abdillah, pada masa al-Khulafaul-Rasyidun (11-41 H/632-661 M), bentuk negara lebih tepat disebut republik karena sistem pemilihan kepala negara dilakukan oleh rakyat atau wakilnya berdasarkan kualitas individu daripada ikatan keturunan (Abdullah, 2000).

Hak politik rakyat akan lebih dilindungi dalam sistem pemerintahan republik. Dalam pemerintahan republik, sistem demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan hak-haknya. Menurut Masykuri Abdillah, pilar-pilar demokrasi terdiri dari kemauan politik negara (negara), komitmen politik yang kuat dari masyarakat politik (masyarakat politik), dan masyarakat sipil yang kuat dan mandiri. Dalam sebuah negara, ketiga komponen ini dibangun untuk menjamin kekuasaan mayoritas, suara rakyat, dan pemilihan umum yang bebas dan adil (Abdillah, 1999).

Kondisi politik, sosial, dan keagamaan Arab Saudi dan Iran sering memengaruhi hubungan Syiah-Suni secara langsung dan tak langsung. Ada juga peran pihak ketiga di luar kedua kelompok tersebut. Persaingan politik di Arab Saudi antara Iran dan kelompok Syiah Sunni semakin tajam sebagai akibat dari kepentingan Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara besar lainnya.

Iran berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi Arab Saudi serta negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Israel. Hingga kini, belum ada kesepakatan untuk normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Namun, sesuai dengan teori realisme kontemporer yang menyatakan bahwa musuh dari musuh saya adalah teman saya, ada hubungan tidak langsung antara Arab Saudi dan Israel, serta hubungan mereka dengan aktor luar yang penting di kawasan Timur Tengah. Ini termasuk perang proxy yang melibatkan Arab Saudi dan konflik berkepanjangan di Suriah dan Yaman (Maulana, 2019). Diketahui bahwa kehadiran Israel memperburuk konflik di Yaman dan Suriah karena Israel tidak ingin Iran meningkatkan dominasinya di Timur Tengah, yang bisa mengancam rencana politik Israel untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut.

Sejak Revolusi Islam Iran, hubungan Iran dengan Israel dan Amerika Serikat telah menjadi semakin dingin. Akibatnya, beberapa kebijakan politik Arab Saudi terkait dengan kerjasama tidak resmi mereka dengan Israel. Kedua negara bekerja sama dalam berbagai upaya untuk menghambat pengaruh Iran yang semakin besar di wilayah tersebut. Hubungan mereka unik; di satu sisi, kerjasama meningkat, namun di sisi lain, ada sensitivitas yang kadang-kadang membuat mereka bertentangan. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Saudi yang berbasis di Inggris, Elaph, Jenderal Gadi Eisenkot, kepala staf militer Israel, menyatakan bahwa Israel bersedia berbagi informasi dengan Arab Saudi mengenai perang dengan Iran. "Ada kepentingan bersama dan dalam hal poros Iran, kami sepenuhnya sejalan dengan Saudi." Dari pihak Arab Saudi, Dr. Muhammad bin Abdul Karim Issa, mantan Menteri Kehakiman Saudi, menyatakan kepada surat kabar Israel Maariv bahwa "Tidak ada kekerasan atau teror yang bisa dibenarkan atas nama Islam di manapun, termasuk di Israel" (Marcus, 2017).

Setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein di Irak, negara ini menjalin hubungan erat dengan Teheran, Iran. Tak mengherankan jika milisi Syiah dari Irak turut berperan aktif dalam pertempuran di Suriah untuk mendukung pemerintahan Bashar al-Assad. Selain itu, perhatian Iran terhadap dukungan aktif kepada pihak pro-Assad bersama dengan kekuatan militer Rusia membuat arus konflik semakin berpihak kepada Iran. Dukungan ini memungkinkan terbentuknya koridor Iran yang membentang dari Teheran hingga Laut Mediterania. Banyak orang Sunni melihat perkembangan ini sebagai infiltrasi Persia dan kekuatan asing ke jantung Timur Tengah, terutama di Saudi (Marcus, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa konflik dan rivalitas antara Iran dan Arab Saudi benar-benar memengaruhi stabilitas di Timur Tengah.

Menurut konsep perimbangan kekuatan yang dikemukakan oleh Brian Healy dan Arthur Stein, mempererat hubungan antara Israel dan Arab Saudi sebagai bagian dari strategi perimbangan kekuatan mereka untuk menandingi Iran adalah tindakan yang sangat masuk akal dan rasional. Iran dan sekutunya, seperti Hizbullah, semakin unggul di kawasan tersebut. Tanpa perimbangan kekuatan ini, dominasi Iran dapat berdampak signifikan pada kedua negara tersebut. Ini juga menunjukkan teori keseimbangan kekuatan bahwa musuh dari musuh saya adalah teman saya. Dalam hal ini, Arab Saudi adalah musuh Iran, dan Israel serta Iran adalah musuh satu sama lain.

Selain itu, pihak-pihak lain juga terlibat aktif dalam konflik antara Arab Saudi dan Iran. Seorang wartawan Kompas, Haryo Jadi, menyatakan bahwa AS bekerja sama dengan Arab Saudi untuk melawan milisi Iran di Yaman. Presiden AS saat ini, Joe Biden, telah memberikan izin kepada Arab Saudi dan sekutunya untuk menyerang milisi Iran di Suriah. Hal ini sesuai dengan teori Pierre Bourdieu bahwa aktor eksternal dan struktur sosial memengaruhi realitas sosial.

*3.5 Konflik Suriah dalam persaingan Arab Saudi (sunni) – Iran (syiah)*

Pada akhirnya, fenomena Arab Spring yang dimulai di Tunisia dan Mesir juga menjalar ke Suriah. Fenomena ini dimulai pada Maret 2011, ketika para pemuda di Dara'a, Suriah Selatan, ditangkap karena menuliskan slogan "Orang-orang ingin regim runtuh." Berita tersebut kemudian tersebar luas sehingga masyarakat Suriah berunjuk rasa menentang pemerintah. Setelah protes, gedung-gedung dibakar dan patung mantan Presiden Suriah Hafiz Assad dihancurkan (Abouzeid, 2011).

Setelah itu, Iran membantu pemerintah Suriah menstabilkan situasi dengan mengirim penasihat militer dari Garda Revolusi dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) untuk melatih personel dan memberikan bantuan tambahan guna memperkuat militer dan aparat keamanan Suriah dalam menangani demonstran dan pendukung pemerintah. Selain itu, Iran juga turut serta dalam upaya pembangunan pangkalan militer di Latakia, yang memungkinkan Iran untuk mengirimkan persediaan senjata ke Suriah (Baidawi, 2012). Selain itu, Iran juga berperan sebagai mediator dengan memobilisasi kekuatan Hizbullah di Lebanon untuk mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam menangani pemberontakan dalam negeri Suriah pada tahun 2013, yang didukung oleh kedua negara tersebut (Charin & Saeri, 2016). Sejak perang Iran-Irak pada tahun 1980-1988, Iran dan Suriah telah menjalin kerja sama erat. Pada masa itu, pemerintah Damaskus mengambil sikap yang berbeda dengan mendukung Iran, berbeda dengan kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah Arab lainnya (Baidawi, 2012).

Persekutuan ini telah berkembang menjadi kolaborasi strategis yang bermanfaat bagi kedua negara saat menghadapi perkembangan di Timur Tengah. Karena posisi geografisnya yang dekat, Iran segera membantu rezim Assad dengan segenap kemampuan ketika Suriah menghadapi konflik internal. Selain itu, Hizbullah—wakil Iran di Lebanon—membantu Suriah saat konflik terjadi karena kelompok tersebut didukung oleh persenjataan militer yang lengkap dan memiliki kemampuan untuk mencegah pemberontakan di Suriah.

Kedua negara tersebut telah melakukan kerja sama secara strategis dan saling menguntungkan, menunjukkan bahwa mereka merupakan sekutu penting dalam menangani krisis di Suriah. Koalisi ini, yang juga melibatkan Rusia dan Cina, telah berhasil mempertahankan kepemimpinan Bashar al-Assad di Suriah. Hal ini bertentangan dengan aspirasi revolusioner yang ditekankan oleh Iran terhadap substansi revolusi di Suriah. Mengingat bahwa Suriah diperintah oleh Sekte Alawiyah, sebuah sekte minoritas dalam Islam, beberapa pemimpin agama Syiah telah memperkuat legitimasi rezim Ba'ath di Damaskus dengan mengklaim bahwa Sekte Alawiyah adalah bagian dari keluarga Syiah. Oleh karena itu, Iran dan Suriah terus menjalin kerja sama (Byman, 2006). Meskipun ada perbedaan bahasa, hubungan Suriah-Iran sangat signifikan karena adanya kesamaan ideologi dan kerja sama strategis di antara keduanya. Selain itu, Suriah dianggap oleh Iran sebagai sekutu strategis yang dapat membantu Iran mempertahankan posisinya di Timur Tengah.

Di sisi lain, hubungan antara Suriah dan Arab Saudi berbeda jauh. Meskipun mereka menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah Assad sebelum Arab Spring, Arab Saudi tidak menunjukkan kemesraan atau kerja sama strategis. Oleh karena itu, Arab Saudi melihat krisis di Suriah sebagai peluang untuk memperluas pengaruhnya, terutama setelah rezim yang selama ini berkuasa menjadi terdorong dan diliputi oleh pengaruh Iran yang berideologi Syiah.

Ketika terjadi krisis, Saudi Arabia segera mengubah orientasi politik internasionalnya dan menjadi negara pertama yang menentang pemerintahan Bashar Al Assad. Melalui pernyataan resmi negaranya, Raja Abdullah menyatakan bahwa pemerintah Suriah terlibat dalam tindakan pembunuhan massal, dan mengajak rakyat Suriah untuk menentang pemerintah sebagai respons terhadap pembunuhan demonstran. Tidak hanya itu, pemerintah Riyadh juga menarik duta besarnya dari Damaskus sebagai ekspresi ketidaksetujuan Saudi Arabia terhadap pemerintahan Damaskus (Nakamura, 2013).

Dalam menanggapi krisis Suriah, Saudi Arabia tidak hanya mengambil sikap menentang pemerintahan Assad, tetapi juga memberikan dukungan finansial dan logistik kepada oposisi. Syeikh Al-Arifi mengadvokasi penggalangan dana yang disebut sebagai bantuan perlawanan di Suriah dengan menghimpun kontribusi dari berbagai aktivis dan masyarakat Saudi. Ia menjadi juru bicara dan pendukung gerakan yang mendukung Arab Saudi dalam mendukung oposisi Suriah. Pada Mei 2012, dilaporkan bahwa negara-negara Teluk Arab seperti Arab Saudi dan Qatar sepakat untuk mengirimkan bantuan logistik perang kepada kelompok oposisi FSA melalui wilayah selatan Turki. Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk FSA, SNC, dan kelompok oposisi Suriah lainnya. Selain itu, laporan dari New York Times dan BBC menyatakan bahwa Arab Saudi dan Qatar telah mengirim senjata ringan kepada kelompok oposisi Suriah. Laporan dari BBC tentang penemuan senjata milik Arab Saudi di markas kelompok oposisi Suriah di Aleppo mendukung klaim tersebut (Tjarsono & Khsan, 2015).

Dengan pergolakan di Suriah, Arab Saudi memiliki kesempatan untuk mengakhiri koalisi yang telah ada antara Suriah dan Iran. Diharapkan bahwa pemerintah Saudi akan menerapkan kebijakan anti-Iran untuk menekan Iran dan mengakhirinya dengan kehilangan pengaruhnya di Suriah. Dengan pergantian pemerintahan dan kepemimpinan yang berhaluan dengan Arab Saudi, tujuan untuk menghentikan kekuatan Iran di Timur Tengah dan untuk menyeimbangi kekuatan Iran dapat terjadi.

Karena populasi Sunni Suriah mencakup 75% dari 22,5 juta orang, sedangkan Syiah hanya 15%, Saudi Arabia percaya bahwa pergantian kepemimpinan yang lebih pro Saudi Arabia dan berhaluan Sunni adalah keniscayaan (Hidcom, 2016). Kebijakan politik luar negeri Saudi Arabia yang berfokus pada "solidaritas dan kesatuan Muslim", dengan proaktif mendukung pemerintahan Sunni dan lebih menentang Syiah, baik dalam bentuk pemerintahan maupun ideologi keagamaan, akan bertentangan jika ada kemungkinan untuk mengubah kepemimpinan Suriah (Dacey & Levy, 2013).

Kekuatan militer Presiden Bashar Assad bersaing dengan barisan pilihan yang didukung oleh negara-negara barat, Arab Saudi, dan Qatar dalam perang saudara yang terus berlangsung di Syria. Mereka terus berperang untuk agama Sunni bahkan setelah munculnya anasir al Qaeda. Pada akhirnya, ini mengarah pada pembentukan Islamic State of Irak and Syria (ISIS). Menurut Azyumardi Azra, faktor politik yang mudah diselesaikan menyebabkan kondisi negara-negara tersebut menjadi kacau balau. Ini menghasilkan masalah yang rumit tentang sektarianisme keagamaan, yang tingkat kebrutalannya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan norma-norma kemanuaisaan yang adil dan beradab (Azra, 2016).

*3.5 Konflik Yaman dalam persaingan Arab Saudi (sunni) – Iran (syiah)*

Setelah menilai bahwa fatwa-fatwa ulama Zaidiyah tidak sesuai dengan prinsip Syiah, Badruddin al-Houthi memutuskan hubungannya dengan mereka dan memulai pemberontakan Houthi. Sejak saat itu, dia beralih ke aliran Imamiah dan kemudian pergi ke Iran untuk mendalami pemahaman agamanya dengan lebih baik (Charin & Saeri, 2016). Husain bin Badruddin al-Houthi, anak dari Badruddin al-Houthi, meninggalkan partai al-Haq, yang mendukung ajaran dan pandangan Syiah Zaidiyah, untuk membentuk kelompok baru yang dikenal sebagai Syiah Houthi. Awalnya, gerakan kelompok ini hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi kemudian bergabung dengan pemberontakan melawan Partai Persatuan Yaman, yang mewakili komunitas Sunni. Namun, pada tahun 2002, mereka berubah menjadi kelompok yang menentang pemerintah (Charin & Saeri, 2016).

Sejak 2009, Iran telah membantu kelompok Houthi dalam menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengambil alih pusat ibu kota Yaman, Sana'a. Seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 12 dan 72 dari Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, yang menyatakan bahwa Syiah Imamiyah adalah prinsip dasar negara Iran dan bukan hanya agama resmi negara itu, Iran berusaha untuk memperluas ideologi Syiah Imamiyahnya. Oleh karena itu, pendekatan Syiah Houthi dengan Iran didasarkan pada ideologi ini.

Perlawanan Houthi muncul sebagai akibat dari penghapusan kelompok Syiah di Yaman dan dominasi pemerintahan Sunni. Iran dan Houthi melihat saat ini sebagai kesempatan yang baik untuk memulai perubahan struktur politik dan sosial di Yaman karena sitausi sosial keagamaan semakin meningkat. Iran menggunakan Houthi di Yaman sebagai kesempatan untuk menyebarkan ideologi imamiyah dan memulai revolusi di Teluk Arab karena pemerintah yang berkuasa di sana merepresi kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini memberikan inspirasi bagi Iran untuk melakukan revolusi di seluruh dunia Arab.

Keterlibatan Iran dalam konflik saudara di Yaman telah memperburuk situasi konflik antara Saudi Arabia dan Iran. Dalam usaha mereka untuk menyelesaikan konflik ini, koalisi Arab yang dipimpin oleh Saudi Arabia menggunakan Yaman sebagai medan pertempuran melawan Iran. Saudi Arabia mengamati bahwa kelompok Houthi, yang didukung oleh Iran, semakin memperkuat posisinya, terutama karena basis mereka berada di dekat perbatasan Saudi-Yaman. Saudi Arabia percaya bahwa intervensi diperlukan untuk mengatasi situasi ini. Dalam rangka itu, Saudi Arabia membentuk aliansi Decisive Storm dengan negara-negara seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Yordania, Maroko, Mesir, dan Sudan (Budiman & Waluyo, 2016).

Intervensi Iran terhadap kelompok Houthi di Yaman adalah bagian dari upaya Iran untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya. Ini dilakukan untuk mengimbangi dominasi Saudi Arabia di Timur Tengah dan Teluk Arab dan menyebarkan ideologi Syiah di Teluk Arab. Intervensi ini juga memiliki orientasi ekonomi yang akan menguntungkan Iran jika Houthi dapat mengambil alih Yaman.

Bagi Arab Saudi dan koalisinya, campur tangan mereka di Yaman merupakan usaha untuk mencegah pengaruh Syiah yang berbasis di Iran agar tidak meluas lebih jauh di Timur Tengah. Mengingat pengaruh besar Saudi Arabia atas negara-negara Sunni di kawasan Timur Tengah, termasuk di Teluk Arab, Yaman tidak terkecuali sebelum konflik dimulai. Pemerintah sah Saudi Arabia juga sangat tergantung pada dan dipengaruhi oleh Yaman. Pemerintah Saudi Arabia percaya bahwa melindungi Yaman dari pengaruh Iran sangat penting untuk menjaga dominasi Iran di Teluk Arab dan potensi ekonominya.

Banyak negara besar ingin mengunjungi Yaman karena lokasinya yang strategis, tanahnya yang subur, curah hujan tinggi, dan Bab al-Mandeb. Saudi Arabia dan Iran sangat memahami posisi Yaman dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan mereka di sana untuk kepentingan mereka sendiri di bidang politik dan ekonomi. Tidak mengherankan bahwa kedua negara tersebut menggunakan pendekatan ideologis untuk menguasai Yaman secara global.

*3.5 Arab Saudi, Iran, dan peran pihak ketiga dalam persaingan kepentingan*

Arab Saudi dan Iran telah lama terlibat dalam konflik, tetapi ketegangan mereka semakin meningkat setelah Revolusi Iran pada tahun 1979. Sejarah menunjukkan bahwa perselisihan antara keduanya dipicu oleh campur tangan Amerika Serikat dan Rusia. Di negara-negara kaya minyak ini, keduanya memiliki kepentingan yang serupa. Namun, konflik antara Arab Saudi dan Iran selalu memiliki dimensi ideologis agama, selain faktor ekonomi. Iran mewakili aliran Syiah-nya, sementara Arab Saudi dipengaruhi oleh ajaran Wahabi Sunni. Kedua negara mencari dukungan internal sebagai sekutu yang dapat membantu mereka memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut (Machmudi, 2021). Sementara Uni Emirat Arab, Mesir, dan Sudan telah memberikan dukungan kepada Arab Saudi, Iran juga telah berhasil mendapatkan dukungan dari Irak dan Suriah.

Arab Saudi dan Iran masih berperang di Yaman. Daerah Qatif memiliki banyak minyak dan gas alam yang kaya, dan mayoritas penduduknya adalah Syiah. Sebaliknya, Arab Saudi sangat ingin mempertahankan halaman belakangnya, yang termasuk wilayah Qatif. Keinginan mereka untuk menguasai wilayah ini didorong oleh dorongan ekonomi yang kuat dan perbedaan keagamaan yang kuat. Rivalitas dan perang proxy antara Saudi dan Iran semakin meningkat dan semakin memburuk sejak Iran terlibat dalam konflik Yaman yang melibatkan kelompok Houthi. Sebaliknya, keduanya jelas mendukung konflik Suriah. Kedua belah pihak terus memberikan bantuan dan senjata kepada siapa pun yang terlibat dalam konflik. Sementara Iran sepenuhnya mendukung pemerintahan Bashar Asad, Arab Saudi mendukung oposisi (Mustahyun, 2017).

Pada tahun 2003, invasi yang dipimpin oleh AS di Irak berhasil menjatuhkan Saddam Hussein dari kekuasaan. Saddam Hussein, seorang pemimpin Arab Sunni yang secara langsung menentang Iran, dianggap telah memberikan kemudahan bagi Iran untuk memperluas pengaruhnya di Irak setelah kejatuhan Saddam Hussein. Sejak itu, pengaruh Iran semakin meningkat di Irak. Tahun 2011 juga menjadi tahun di mana ketegangan antara Arab Saudi dan Iran semakin meningkat. Arab Spring pada tahun tersebut mengganggu stabilitas politik di banyak negara di Timur Tengah, terutama di Suriah, Bahrain, dan Yaman, yang dimanfaatkan oleh Iran dan Arab Saudi untuk memperkuat dominasi mereka di wilayah tersebut, yang kemudian meningkatkan ketegangan dan saling curiga di antara keduanya. Beberapa pihak luar kemudian turut campur dalam konflik antara keduanya. Di bawah pemerintahan Trump dan di tengah ketegangan dengan Israel, yang merupakan musuh utama Iran, Arab Saudi mendapat dukungan untuk menahan pengaruh Iran yang semakin kuat di kawasan tersebut. Sebaliknya, Iran memilih untuk mendukung Suriah secara terbuka (Tasnur & Wati, 2019) .

Publik terus menyaksikan bahwa Israel terus menentang pengembangan dan penguatan program nuklir Iran. Dalam pidatonya pada malam Hari Peringatan Holocaust, Perdana Menteri Israel Netanyahu dengan tegas menyatakan bahwa Israel tidak akan terikat dengan perjanjian nuklir terbaru yang melibatkan Iran. Netanyahu menegaskan, "Kesepakatan dengan Iran yang membuka jalan bagi senjata nuklir—senjata yang mengancam eksistensi kami—tidak akan mengikat kami dengan cara apa pun." Selain itu, Israel secara terbuka mengumumkan kepada Amerika Serikat bahwa mereka telah melakukan serangan terhadap kapal Iran Saviz di Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal-kapal mereka, seperti yang dilaporkan oleh New York Times. Sampai saat ini, keberhasilan Bashar al-Assad di Suriah menunjukkan bahwa Iran telah berhasil menerapkan strategi perimbangan kekuatan terhadap musuh utamanya, Arab Saudi, dan beberapa sekutunya di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, situasi di Yaman menunjukkan bahwa Iran dan sekutunya mampu melakukan strategi perimbangan kekuatan terhadap pemberontak Houthi.

Sesuai dengan teori Brian Healy dan Arthur Stein, mencari mitra atau sekutu merupakan langkah yang diambil sebagai bagian dari upaya perimbangan politik sebagai tanggapan terhadap perbedaan pendapat antara Arab Saudi, Iran, dan Israel dalam konflik Suriah dan Yaman. Selain Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Mesir, dan Yordania mendukung Arab Saudi. Di sisi lain, Iran mendapat dukungan penuh dari Rusia, serta mendapat dukungan dari pemerintah Suriah, Irak, kelompok milisi Syiah yang bersimpati dengan Iran, dan Hizbullah.

**4. Kesimpulan**

Konflik antara Sunni dan Syiah telah menjadi pertarungan berlarut-larut sejak periode suksesi kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang awalnya dimulai sebagai pertikaian politis telah meluas menjadi pertarungan ideologis dan agama. Hingga kini, pertikaian ini masih berlanjut dalam berbagai bentuk, dan telah berubah menjadi konflik yang berkelanjutan, dipicu oleh perbedaan politik, ideologi, paradigma, dan pandangan. Sejarah pahit yang terjadi antara kedua aliran ini menjadi penghalang bagi upaya rekonsiliasi.

Bagi kelompok Syiah, penderitaan yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib hingga tragedi Karbala, di mana kisah kesedihan Husein, cucu Nabi Muhammad, dan Ahlul Baitnya dianggap sebagai tragedi dan kenangan yang sangat menyakitkan. Namun, bagi kelompok Sunni, penghinaan, celaan, fitnah, dan pengkafiran yang ditujukan kepada Abubakar, Umar, Utsman, dan Aisyah, istri Nabi Muhammad, telah menciptakan ketegangan antara Sunni dan Syiah, serta hubungan antara negara-negara Timur Tengah hingga saat ini.

Pertikaian dalam politik dan urusan internasional antara kelompok Sunni yang mendapat dukungan dari Saudi Arabia dan kelompok Syiah yang didukung oleh Iran telah menciptakan persaingan global. Ini disebabkan oleh keinginan masing-masing negara untuk mendominasi di Timur Tengah. Peran dan kepentingan Arab Saudi dan Iran mencerminkan dinamika persaingan kekuatan di kawasan tersebut. Meskipun keduanya menganut Islam, keyakinan mereka berbeda. Iran menganut paham Syiah, sementara Saudi Arabia menganut paham Sunni, yang juga menjadi keyakinan mayoritas negara-negara di Timur Tengah.

Sesuai dengan prinsip perimbangan kekuatan yang digagas oleh Brian Healy dan Arthur Stein (1973), Iran dan Arab Saudi aktif mencari sekutu untuk menyeimbangkan kekuatan mereka dengan negara lain yang dianggap memiliki pengaruh yang lebih besar. Salah satu strategi yang mereka terapkan adalah membentuk aliansi yang didasarkan pada kesamaan ideologi Sunni, sebagai respons terhadap upaya Iran dalam memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, seperti yang terlihat di Suriah dan Yaman. Kedua negara menggunakan ideologi yang sama untuk menentang satu sama lain. Iran berusaha untuk mengatasi pengaruh ideologi dan politiknya di Timur Tengah dengan membangun hubungan dengan pemimpin lokal yang mendukung pandangannya melalui Forum Internasional. Di sisi lain, Iran mengadopsi pendekatan yang berbeda dari Arab Saudi, dengan lebih fokus pada koneksi dengan masyarakat negara-negara lain yang memiliki pemahaman yang sejalan dengan mereka. Dengan cara ini, Iran berencana untuk menggunakan jaringan yang sudah dibangun untuk menyebarkan ideologi dan memperluas pengaruhnya, seperti yang terjadi di Yaman.

Dalam beberapa situasi, ideologi dan keyakinan agama yang ada di Timur Tengah dimanfaatkan sebagai alat politik untuk mendukung ambisi mereka dalam mengendalikan negara-negara kecil dan kawasan regional yang berpengaruh.

**Kontribusi Penulis**

Semua penulis berkontribusi penuh atas penulisan artikel ini.

**Pendanaan**

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

**Pernyataan Dewan Peninjau Etis**

Tidak berlaku.

**Pernyataan *Informed Consent***

Tidak berlaku.

**Pernyataan Ketersediaan Data**

Tidak berlaku.

**Konflik Kepentingan**

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

**Akses Terbuka**

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

**Daftar Pustaka**

Abdillah, M. (1999). Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1996-1993). Tiara Wacana.

Abdillah, M. (2013). Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi. AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, 13(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>

Abdullah, M. (2000). Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam islam ; Sebuah Prespektif Sejarah dan Demokrasi Modern. Tashwirul Afkar, No. 7/2000(7), 89–90.

Abidin, Z. (2012). Imamah dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial: Telaah atas Pemikiran Teologi Syi’ah. Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Abouzeid, R. (2011). Syria’s Revolt: How Graffiti Stirred an Uprising. Https://Time.Com/. <https://content.time.com/time/world/article/0,8599,2060788,00.html>

Afala, L. O. M., Tamar, M., & Murfi, A. (2009). Pengaruh Agama dalam Sistem Pemerintahan Negara (Studi Kasus Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran). Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2), 145–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jgov.v2i2.1598>

Al-Musawi, S. (1988). Dialog Sunnah Syi’ah: Surat Menyurat antara Asy-Syaikh al-Bisyri al-Maliki Rektor al-Azhar di Kairo Mesir, dan as-Sayyid Syarafuddin al-Musawi al-’Amili Seorang Ulama Besar Syi’ah. Mizan.

Ali Audah. (1999). Dari Khazanah Dunia Islam. Pustaka Firdaus.

Azra, A. (2016). Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi. Prenada Media Group.

Baidawi, A. (2012). Daya Tahan Rezim Bashar Al Assad Terhadap Tekanan di Syria. Jurnal Skripsi, Yogyakarta(UMY).

Budiman, H., & Waluyo, T. J. (2016). Kebijakan Luar Negeri Pakistan Menolak Bergabung Ke Koalisi Militer Arab Saudi dalam Menghadapi Konflik Yaman. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3(1), 1–15.

Byman, D. L. (2006). Syria and Iran: What’s Behind the Enduring Alliance. Brookings. <https://www.brookings.edu/articles/syria-and-iran-whats-behind-the-enduring-alliance/>

Charin, R. O. P., & Saeri, M. (2016). Kepentingan Iran Melakukan Intervensi Terhadap Konflik INternal Yaman Tahun 2014-2015. JOM FISIP, 3(2), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/9887>

Dacey, J. B., & Levy, D. (2013). The Regional Struggle for Syria. <https://ecfr.eu/wp-content/uploads/ECFR86_SYRIA_REPORT.pdf>

Faza, A. M. (2015). Syi’ah dalam Kitab Sunni. Perdana PUblishing.

Healy, B., & Stein, A. (1973). The Balance of Power in International History. Journal of Conflict Resolution, 17(1), 33–61. <https://doi.org/10.1177/002200277301700103>

Hidcom, A. (2016). Yang Perlu Diketahui: Apa Perang Suriah, Rezim Bashar dan Keterlibatan Syiah? Hidayatullah.Com. <https://hidayatullah.com/spesial/ragam/2016/12/20/108058/yang-perlu-diketahui-apa-perang-suriah-rezim-bashar-dan-keterlibatan-syiah.html>

Kraemer, J. L. (2003). Renaisans Islam: Kebangkitan Intelektual dan Budaya pada Abad Pertengahan. Mizan.

Lapidus, I. M. (2000). Sejarah Sosial Ummat Islam. Raja Grafindo Persada.

Machmudi, Y. (2021). Timur Tengah dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia. Bumi Aksara.

Marcus, J. (2017). Apa yang melatarbelakangi perselisihan Arab Saudi dan Iran? Bbc. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42036425>

Maulana, M. S. (2019). Persaingan Kekuatan Saudi Arabia (Sunni) Dan Iran (Syiah) Pada Kasus Konflik Kontemporer (Suriah Dan Yaman). Jurnal Gama Societa, 2(2), 101. <https://doi.org/10.22146/jgs.48867>

Mustahyun. (2017). Rivalitas Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah Pada Arab Spring Suriah Tahun 2011-2016. Journal of Islamic World and Politics, 1(1), 90–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jiwp.1105>

Nakamura, S. (2013). Saudi Arabian Diplomacy during the Syrian Humanitarian Crisis: Domestic Pressure, Multilaterialism, and Regional Rivalry for an Islamic State. <https://www.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Reports/Seisaku/pdf/201307_mide_13.pdf>

Nasution, H. (1985). Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya. Universitas Indonesia.

Sahide, A. (2013). KONFLIK SYI’AH-SUNNI PASCA-THE ARAB SPRING. Jurnal Kawistara, 3(3). <https://doi.org/10.22146/kawistara.5225>

Shihab, M. Q. (2007). Sunni-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?: Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran. Lentera Hati.

Syak’ah, M. M. (1996). Islam Bila Madzahib. Dar Mishiriyah Libnaniah.

Tasnur, I., & Wati, F. W. (2019). Konflik Sunni-Syiah Pasca Arab Spring: Menelusuri Motif Politik Dibalik Perang Berkepanjangan di Suriah. Jurnal Academia Praja, 2(02). <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.112>

Thabathathaba’i, A. M. (1989). Shi’ite Islam (Terj.). Pustaka Utama Grafiti.

Tjarsono, I., & khsan, F. (2015). Kebijakan Politik Luar Negeri Arab Saudi terhadap Krisis Syria (2011-2014). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2(2).

Zhahir, I. I. (1984). al-Syi’ah wa al-Tasyayyu’ (Cet. I). Idarah Tarjuman al-Sunnah.

|  |
| --- |
| **Biografi Penulis**    **Muhammad Yudhi Firmansyah,**  Program Doktor Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta   * Email: [muhammad.yudhifirmansyah22@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:muhammad.yudhifirmansyah22@mhs.uinjkt.ac.id) * ORCID: * Web of Science ResearcherID: * Scopus Author ID: * Homepage: |